

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI USAHA BUDIDAYA IKAN
KERAPU DI KABUPATEN PESISIR SELATAN (STUDI KASUS KELOMPOK
NELAYAN KECAMATAN IV JURAI)**

Oleh : Intan Permatasari

Pembimbing : Dr. Adiando, S.Sos., M.Si

Program Studi Ilmu Administrasi Publik - Jurusan Ilmu Administrasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Email: intan.permatasari100200@gmail.com

Abstract

The phenomenon of low fishermen income, the Nipah River, IV Jurai Subdistrict which has the potential to cultivate grouper fish but limited human resources in managing the existing marine potential makes researchers interested in researching Community Empowerment through Grouper Cultivation Business in Pesisir Selatan Regency (Case Study). Fisherman Group of District IV Jurai). The purpose of this study was to determine community empowerment in grouper cultivation in Pesisir Selatan Regency and to determine the factors that hinder community empowerment through grouper cultivation in Pesisir Selatan Regency. This study uses a qualitative method where the data collection techniques used are interviews, observation and documentation. Data analysis techniques in this study are data reduction, data presentation and conclusions. The results of this study can be seen that community empowerment through grouper cultivation in Pesisir Selatan Regency on enabling indicators has been successful, but on empowering and protecting indicators it is still not successful, because there are several inhibiting factors, namely the lack of quality seed assistance from the Fisheries and Food Service. Pesisir Selatan Regency, the inability of some fishermen to manage capital, and the consumptive nature of fishermen. It is hoped that in the future the Fisheries and Food Service of Pesisir Selatan Regency will optimize the quality of the seed assistance provided, and also fishermen in IV Jurai District will be better at managing capital and eliminating consumptive nature.

Pendahuluan

Kabupaten Pesisir Selatan merupakan salah satu dari 19 kabupaten / kota di Provinsi Sumatera Barat, dengan luas wilayah 5.749,89 Km². Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan terletak di bagian selatan Propinsi Sumatera Barat, memanjang dari utara ke selatan dengan Panjang garis pantai 234,2 Km⁴⁷. Kabupaten Pesisir Selatan, sebelah utara berbatasan dengan Kota Padang, sebelah timur dengan kabupaten Solok, Solok Selatan dan propinsi Jambi, sebelah selatan dengan Propinsi Bengkulu dan sebelah barat dengan Samudera Indonesia. Kabupaten Pesisir Selatan memiliki topografi wilayah berbukit-bukit dengan ketinggian berkisar 0-1000 m dari permukaan laut, memiliki 57 pulau serta dialiri sebanyak 18 sungai dengan 11 sungai besar dan 7 sungai kecil. Pada tahun 2021 kabupaten Pesisir Selatan memiliki populasi sebanyak 515.549 jiwa. Secara geografis Kabupaten Pesisir Selatan terletak pada 0.000 59' -

20 28,6' Lintang Selatan dan 1010 01" - 1010 30" Bujur Timur. Wilayah administrasi Kabupaten Pesisir Selatan terdiri atas 15 kecamatan (pemekaran 3 kecamatan, 16 Juli 2012) dan 182 nagari (pemekaran nagari tahun 2011).

Sebagian besar penduduk Pesisir Selatan bergantung pada sektor pertanian tanaman pangan, perikanan dan perdagangan. Sementara sumber daya potensial lainnya adalah pertambangan, perkebunan dan pariwisata. Kabupaten Pesisir Selatan adalah Kabupaten dengan penghasil Ikan Laut terbesar di Sumatera Barat selain dari Agam, Pariaman, dan Padang. Setiap tahunnya hasil perikanan di Kabupaten Pesisir selatan selalu meningkat dengan pesat bahkan selalu melebihi target. Data ini memberikan gambaran bahwa Kabupaten Pesisir Selatan memiliki potensi di bidang Perikanan.

Tabel 1.1

Produksi Ikan Laut Segar Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019-2021

No	Kecamatan	Produksi Ikan Laut Segar (Ton)		
		2019	2020	2021
1	Silaut	69,10	24,60	12,50
2	Lunang	-	-	-
3	Basa Ampek Balai Tapan	-	-	-
4	Ranah Ampek Hulu Tapan	-	-	-
5	Pancung Soal	40,65	-	-
6	Airpura	1 661,10	2 245,65	2 080,69
No	Kecamatan	Produksi Ikan Laut Segar (Ton)		

		2019	2020	2021
7	Linggo Sari Baganti	5 018,60	6 687,54	6 987,86
8	Ranah Pesisir	2 035,20	2 278,70	1 969,73
9	Lengayang	6 546,16	5 960,84	6 159,54
10	Sutera	7 381,65	7 675,78	8 706,59
11	Batang Kapas	2 774,30	2 456,68	3 549,78
12	IV Jurai	1 478,70	1 298,79	1 335,65
13	Bayang	1 335,70	1 197,65	1 276,89
14	IV Nagari Bayang Utara	-	-	-
15	Koto XI Tarusan	7 031,22	8 186,75	9 267,64

Sumber : Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan

Berdasarkan Tabel diatas dapat diketahui bahwa Kabupaten Pesisir Selatan yang terdiri dari 15 kecamatan dapat memproduksi ikan laut segar yang dapat dilihat pada 3 tahun terakhir (2019, 2020, dan 2021). Pada tahun 2019 sebanyak 35.372,38 ton, pada tahun 2020 sebanyak 38 012,98 ton, dan pada tahun 2021 sebanyak 41.346,87 ton. Ini berarti bahwa kabupaten Pesisir Selatan memiliki potensi di bidang perikanan karena setiap tahunnya produksi Ikan Segar selalu meningkat. Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan seperti masyarakat pesisir pada umumnya mempunyai mata pencaharian di bidang pertanian dan perikanan, baik sebagai nelayan

maupun pembudidaya ikan. Jumlah nelayan di Kabupaten Pesisir Selatan berjumlah 10.406 jiwa yang menyebar di 9 kecamatan dengan 47 desa pantai. Jumlah Rumah Tangga Perikanan (RTP) terdiri dari nelayan penuh 9.056 Rumah Tangga Perikanan, petani nelayan (air deras) 900 Rumah Tangga Perikanan yang terhimpun dalam wadah koperasi/keompok nelayan. Berdasarkan data yang ada luas potensi untuk budidaya laut sebesar 2347.72 Ha ditambah dengan potensi budidaya air payau sebesar 26.278,18 Ha. Data ini memberikan gambaran bahwa Kabupaten Pesisir Selatan memiliki potensi di bidang budidaya Perikanan.

Tabel 1.2

Produksi Budidaya Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019-2021

No	Kecamatan	Produksi Budidaya Perikanan (Ton)		
		2019	2020	2021
1	Silaut	490,50	265,70	278,98
No	Kecamatan	Produksi Budidaya Perikanan (Ton)		
		2019	2020	2021
2	Lunang	516,55	389,76	409,24

3	Basa Ampek Balai Tapan	785,15	298,75	307,71
4	Ranah Ampek Hulu Tapan	669,35	332,40	345,69
5	Pancung Soal	1 009,10	386,50	480,79
6	Airpura	366,30	389,67	413,67
7	Linggo Sari Baganti	821,50	495,75	505,66
8	Ranah Pesisir	776,20	492,25	681,52
9	Lengayang	1 164,00	1 321,50	1 926,69
10	Sutera	1 182,35	1 456,55	1 602,55
11	Batang Kapas	712,40	1 185,65	1 420,87
12	IV Jurai	986,05	1 386,65	1 842,64
13	Bayang	626,10	1 123,76	1 303,56
14	IV Nagari Bayang Utara	367,90	885,59	1 044,99
15	Koto XI Tarusan	1 544,40	2 766,75	3 181,76

Sumber : Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan

Berdasarkan Tabel dapat diketahui bahwa Kabupaten Pesisir Selatan yang terdiri dari 15 kecamatan pada 3 tahun terakhir yaitu tahun 2019, 2020, dan 2021 memiliki potensi di bidang budidaya perikanan. Dapat dilihat pada tahun 2019 sebanyak 12.017,85 ton, pada tahun 2020 sebanyak 13.177,23 ton, dan pada tahun 2021 sebanyak 15 746,32 ton. Ini berarti bahwa kabupaten Pesisir Selatan memiliki potensi di bidang budidaya

perikanan karena setiap tahunnya hasil dari budidaya perikanan selalu meningkat. Kabupaten Pesisir Selatan melalui Dinas Perikanan dan Pangan memiliki Strategi dan Kebijakan dalam mewujudkan Sektor Kelautan dan Perikanan yang Mandiri, Maju, Kuat dan Berbasis Kerakyatan dilakukan dalam beberapa strategi dan kebijakan yang dapat dijabarkan dalam tabel berikut :

Tabel 1.3

Strategi dan Kebijakan Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan

No	Strategi	Kebijakan
1	Peningkatan SDM masyarakat kelautan dan perikanan.	Memperkuat pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan
2	Pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan	Meningkatkan penataan dan pengelolaan lingkungan sumberdaya kelautan dan perikanan
No	Strategi	Kebijakan
	secara efisien dan berkelanjutan	secara komprehensif dengan melibatkan peran serta masyarakat, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
3	Peningkatan sarana dan prasarana serta infrastruktur	Meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana penangkapan ikan

	kelautan dan perikanan	
4	Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk hasil perikanan	Mengoptimalkan potensi budidaya yang belum tergarap serta membangun lapangan kerja diiringi dengan dukungan pengembangan modal dan kepastian berusaha

Sumber : Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk mendorong percepatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan mengampanyekan program minapolitan. Minapolitan sebuah program ekonomi kelautan berbasis kawasan yang terintegrasi berdasarkan prinsip-prinsip terintegrasi, efisiensi, berkualitas dan percepatan. yang diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Minapolitan. Kawasan Minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan atau kegiatan pendukung lainnya. Kemudian, untuk mendukung pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 sebagai bentuk pengembangan kegiatan terpadu dalam pembangunan perikanan berbasis kawasan dengan konsepsi Minapolitan, Menteri Kelautan dan Perikanan menetapkan kabupaten/kota sebagai kawasan minapolitan. Sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No.35 Tahun 2013 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan menjadi 179 Kabupaten/Kota dengan 202 lokasi yang dibagi menjadi 145 kawasan Minapolitan berbasis Perikanan Budidaya dan 57 Kawasan Minapolitan

berbasis Perikanan Tangkap. Pada lampiran 1 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No.35 Tahun 2013 tentang penetapan kawasan minapolitan, salah satu Provinsi di Indonesia yang ditetapkan sebagai kawasan minapolitan adalah Provinsi Sumatera Barat. Wilayah Sumatera Barat menempati sepanjang pesisir barat Pulau Sumatera bagian tengah dengan luas wilayah 42.297,30 km². Ada 7 daerah Kabupaten/Kota yang menjadi kawasan minapolitan di Sumatera Barat yaitu: Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Agam, Kota Padang, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Limapuluh Kota, dan Kabupaten Pasaman Barat. Program minapolitan adalah suatu program kegiatan yang berupaya untuk mensinergiskan kegiatan produksi bahan baku, pengolahan dan pemasaran dalam satu rangkaian kegiatan perusahaan yang memperhatikan keseimbangan permintaan pasar dan pasokan, serta berorientasi terhadap peningkatan nilai tambah untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat. Serta Tujuan dari pengembangan minapolitan yaitu (1) meningkatkan produksi, produktivitas dan kualitas; (2) meningkatkan pendapatan nelayan, pembudidaya dan pengolah ikan yang adil dan merata; (3) mengembangkan kawasan minapolitan sebagai pusat

pertumbuhan ekonomi di daerah dan sentra-sentra produksi perikanan sebagai penggerak perekonomian rakyat (Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan no 12 tahun 2010).

Kabupaten di Sumatera Barat yang menjadi sentra Kawasan Minapolitan salah satunya ialah Kabupaten Pesisir Selatan yang merupakan kawasan sentra minapolitan berbasis perikanan budidaya. Penetapan Kawasan Minapolitan Percontohan Perikanan Budidaya dan Komoditi Unggulan Kabupaten Pesisir Selatan dengan jenis komoditi unggulan perikanan budidaya yang akan dikembangkan pemanfaatannya yaitu, Ikan Kerapu, Udang Vannamei, dan Rumput Laut. Kabupaten Pesisir Selatan merupakan daerah yang memiliki garis pantai terpanjang di Sumatera Barat. Luas daerah ±5.794,95 km² dengan panjang garis pantai 234 km atau 13,70 persen dari luas total wilayah provinsi Sumatera Barat. Sebagian besar Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan berdomisili di wilayah pesisir dan langsung bersebelahan dengan Samudera Hindia. Keadaan yang demikian menyebabkan Kabupaten Pesisir Selatan memiliki potensi yang cukup besar di bidang kelautan dan perikanan.

Untuk penanggung jawab terhadap pelaksanaan budidaya yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten menetapkan Tim Teknis. Penetapan tersebut dikeluarkan dalam Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan No.523/266/Kpts/BPT-PS/2015 tentang

penetapan tim teknis kegiatan pengelolaan sistem perbenihan ikan, pengelolaan kawasan perikanan budidaya, pengelolaan produksi dan usaha pembudidayaan ikan pada satuan kerja dinas kelautan dan perikanan Kabupaten Pesisir Selatan. Program pengembangan perikanan budidaya di Kabupaten Pesisir Selatan diberikan kepada Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN) yang sebelumnya telah dibentuk dan disertai dengan komitmen masing-masing anggota untuk saling bekerjasama dimana setiap kelompok beranggotakan 10-25 orang dan memenuhi kriteria. Pokdakan diidentifikasi oleh Tim Teknis kemudian diusulkan kepada Dinas Perikanan dan Pangan untuk diverifikasi kelompok yang dinyatakan layak/tidak layak. Sebagai sasaran utama program pembudidaya hanyalah berprofesi sebagai nelayan yang mana rata-rata hanya berpendidikan rendah tentu kurang pengetahuan mereka tentang tata cara membudidayakan ikan yang baik. Agar terkelola secara maksimal dan memberikan dampak besar bagi kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, pentingnya pemerintah dalam melakukan bimbingan terhadap nelayan tentang cara budidaya yang baik agar pelaksanaan tujuan berjalan dengan baik.

Di Kecamatan IV Jurai, di Nagari Painan Selatan tepatnya di Kampung Sungai Nipah adalah salah satu kampung yang dipilih untuk melaksanakan program Minapolitan karena memiliki potensi untuk melaksanakan budidaya Ikan khususnya

Ikan Kerapu Bebek dan juga Ikan Kerapu Cantik. Sebelumnya di Kampung Sungai Nipah sebagian besar penduduk bermata pencarian utamanya adalah nelayan tangkap. Nelayan di Kampung Sungai Nipah mengalami pasang surut dalam bidang perekonomian seperti pendapatan yang rendah sehingga tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga.

Hingga Tahun 2022, Program Minapolitan di Kampung Sungai Nipah ini telah dilaksanakan dengan total 17 kelompok. Bantuan ini diberikan sesuai dengan komoditi yang akan dikembangkan oleh masing-masing kelompok. Berikut kelompok penerima paket bantuan pada program minapolitan :

Tabel 1.4

Data Nama Kelompok Penerima Bantuan pada Program Minapolitan Kecamatan IV Jurai Tahun 2022

No	Nama Kelompok	Mulai berdiri
1	Pokdakan Berjuang Bersama	2011
2	Pokdakan Karang Indah	2012
3	Pokdakan Harapan Bersama	2012
4	Pokdakan Ketaping	2012
5	Pokdakan Pasir Putih	2012
6	Pokdakan Riak Pantai	2012
7	Pokdakan Batu Kodi	2012
8	Pokdakan Pinang-Pinang	2013
9	Pokdakan Pinang-Pinang 2	2013
10	Pokdakan Harapan Baru	2013
11	Pokdakan Ubo Duo	2013
12	Pokdakan Agar-Agar	2013
13	Pokdakan Batu Kodi 2	2015
14	Pokdakan Maju Bersama	2015
15	Pokdakan Karang Sapau	2016
No	Nama Kelompok	Mulai berdiri
16	Pokdakan Ujuang Batiang	2017
17	Pokdakan Riak Ombak	2020

Sumber : Dinas Perikanan dan Pangan Kab. Pesisir Selatan

Pada tabel diatas dapat diketahui bahwa ada 17 Pokdakan (Kelompok

Pembudidaya Ikan) yang menerima Bantuan pada Program Minapolitan

Kecamatan IV Jurai dan yang paling pertama berdiri yaitu pada tahun 2011 adalah Pokdakan Berjuang Bersama. Setiap Pokdakan (Kelompok Pembudidaya Ikan) memiliki 10-25 anggota yang sesuai dengan kriteria yang telah di tentukan sebelumnya. Pada Tahun 2011 mulai berdirinya Pokdakan Berjuang Bersama, selanjutnya pada Tahun 2012 ada 6 Pokdakan yang dibentuk, selanjutnya pada Tahun 2013 ada 5 Pokdakan yang dibentuk, Pada Tahun 2015 ada 2 Pokdakan yang dibentuk, Pada Tahun 2016 ada 1 Pokdakan yang dibentuk, pada Tahun 2017 ada 1 Pokdakan yang dibentuk dan yang terakhir pada Tahun 2020 ada 1 Pokdakan yang dibentuk yaitu Pokdakan Riak Ombak. Sehingga sampai saat ini ada total 17 Pokdakan di Kampung Sungai Nipah yang sudah dibentuk oleh Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.

Pokdakan di Kampung Sungai Nipah tersebut melakukan Budidaya Ikan Kerapu dengan Keramba Jaring Apung, baik itu Ikan Kerapu Bebek, maupun Ikan Kerapu Cantik. Ikan kerapu hasil budidaya memiliki keunggulan dibandingkan dengan hasil tangkapan langsung di laut. Keunggulannya yaitu ukuran ikan yang beragam, memungkinkan pembudidaya untuk memanen ikan pada saat ukuran panen/konsumsi yang memiliki nilai ekonomis paling tinggi dan mempunyai daging yang lezat, bergizi tinggi dan mengandung asam lemak tak jenuh. Lalu pasokan ikan kerapu hasil budidaya dapat terus menerus ada karena dapat diatur masa penanaman dan masa panen sesuai dengan

kebutuhan pembudidaya/pasar. Budidaya ikan dengan keramba jaring apung merupakan bentuk/sistem kurungan yang banyak sekali dipakai dan bentuk serta ukurannya bervariasi sesuai dengan tujuan penggunaannya. Kata keramba jaring apung bisa dinamakan untuk menamai wadah pemeliharaan ikan yang terbuat dari jaring yang dibentuk segi empat dan diapungkan ke dalam permukaan air menggunakan pelampung dan kerangka kayu, bambu serta besi penjangkaran. Sejauh ini keramba jaring apung merupakan yang paling baik untuk budidaya ikan secara intensif dibandingkan cara lain dikarenakan perawatan pada keramba jaring apung lebih mudah dilakukan. Mengingat Program Pengembangan Perikanan Budidaya ini berbasis kawasan yang disebut dengan kawasan minapolitan dalam percepatan pembangunan kawasan pedesaan disektor perikanan, tentu dibutuhkan pemanfaatan sumber-sumber dalam menunjang keberhasilan program. Sumber-sumber yang dimaksud adalah seperti sumber daya manusia, uang/modal, sarana dan prasarana serta pasar yang menentukan program minapolitan berjalan dengan baik. Berikut data Sarana dan Prasarana yang diberikan kepada Kelompok Pembudidaya Ikan di Kecamatan IV Jurai tepatnya di Kampung Sungai Nipah pada Tahun 2019 -2021 :

Tabel 1.5
Bantuan Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Program Minapolitan Kecamatan
IV Jurai Tahun 2019-2021

No	Nama Kelompok	Uraian	Vol	Satuan	Tahun
1	Pokdakan Berjuang Bersama	Bibit Kerapu Cantik	250	Ekor	2019
2	Pokdakan Karang Indah	Bibit Kerapu Cantik	250	Ekor	2019
3	Pokdakan Harapan Bersama	Bibit Kerapu Cantik	250	Ekor	2019
4	Pokdakan Ketaping	1. Bibit Kerapu Cantik 2. Bibit Kerapu Bebek	250 1000	Ekor Ekor	2019
5	Pokdakan Pasir Putih	Bibit Kerapu Bebek	700	Ekor	2019
6	Pokdakan Riak Pantai	1. Bibit Kerapu Bebek 2. Bibit Kerapu Cantik 3. Pelet 4. Vitamin 5. Obat	750 750 1200 10 10	Ekor Ekor Kg Bungkus Bungkus	2019
7	Pokdakan Batu Kodi	1. Bibit Kerapu Bebek 2. Bibit Kerapu Cantik 3. Pelet 4. Vitamin 5. Obat	750 750 1200 10 10	Ekor Ekor Kg Bungkus Bungkus	2019
8	Pokdakan Pinang-Pinang	1. Bibit Kerapu Bebek 2. Bibit Kerapu Cantik 3. Pelet 4. Vitamin 5. Obat	750 750 1200 10 10	Ekor Ekor Kg Bungkus Bungkus	2019
9	Pokdakan Pinang-Pinang 2	1. Bibit Kerapu Bebek 2. Bibit Kerapu Cantik 3. Pelet 4. Vitamin 5. Obat	750 750 1200 10 10	Ekor Ekor Kg Bungkus Bungkus	2019
10	Pokdakan Harapan Baru	1. Bibit Kerapu Bebek 2. Bibit Kerapu Cantik 3. Pelet 4. Vitamin 5. Obat	750 750 1200 10 10	Ekor Ekor Kg Bungkus Bungkus	2019
No	Nama Kelompok	Uraian	Vol	Satuan	Tahun
11	Pokdakan Ubo Duo	1. Bibit Kerapu Bebek 2. Bibit Kerapu Cantik 3. Pelet 4. Vitamin	750 750 1200 10	Ekor Ekor Kg Bungkus	2019

		5. Obat	10	Bungkus	
12	Pokdakan Ujuang Batiang	Bibit Kerapu Bebek	400	Ekor	2020
13	Pokdakan Riak Ombak	Bibit Kerapu Bebek	400	Ekor	2020
14	Pokdakan Pinang-Pinang	1. Bibit Kerapu Bebek 2. Bibit Kerapu Cantik 3. Pelet 4. Vitamin 5. Obat	750 750 700 5 5	Ekor Ekor Kg Bungkus Bungkus	2021
15	Pokdakan Maju Bersama	1. Bibit Kerapu Bebek 2. Bibit Kerapu Cantik 3. Pelet 4. Vitamin 5. Obat	750 750 700 5 5	Ekor Ekor Kg Bungkus Bungkus	2021
16	Pokdakan Karang Sapau	1. Bibit Kerapu Bebek 2. Bibit Kerapu Cantik 3. Pelet 4. Vitamin 5. Obat	750 750 700 5 5	Ekor Ekor Kg Bungkus Bungkus	2021

Sumber : Dinas Perikanan dan Pangan Kab. Pesisir Selatan

Pada tabel diatas dapat diketahui bahwa ada 16 bantuan yang diberikan. Bantuan tersebut dapat berupa bibit Ikan Kerapu, Pelet, Vitamin dan juga Obat. Pada Tahun 2019 ada sebanyak 14.400 Ekor Bibit Kerapu, 7200 Kg Pelet, 60 Bungkus Vitamin, dan 60 Bungkus Obat. sedangkan pada Tahun 2020 ada sebanyak 800 Ekor Bibit Kerapu, dan pada tahun 2021 ada sebanyak 4500 ekor bibit kerapu, 2100 Kg Pelet, 15 Bungkus Vitamin dan 15 Bungkus Obat. Semua bantuan tersebut diberikan oleh Dinas Perikanan dan Pangan Provinsi Sumatera Barat kemudian Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai pendamping dan pengawas program minapolitan di Kabupaten Pesisir Selatan tepatnya di Kecamatan IV Jurai (Kampung Sungai Nipah).

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat analisis deskriptif dimana peneliti menjelaskan atau menggambarkan secara sistematis dan aktual tentang fakta khusus yang mempunyai sifat umum dari serangkaian usaha untuk menjawab pertanyaan dari berbagai masalah Pemberdayaan Masyarakat melalui Usaha Budidaya Ikan Kerapu di Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Jenis dan sumber data yang terdiri dari data primer dan sekunder. Teknik analisa data pada penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data, verifikasi data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

A. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Usaha Budidaya Ikan Kerapu di Kabupaten Pesisir Selatan (Studi Kasus Kelompok Nelayan Kecamatan IV Jurai)

Dalam hal ini untuk mengetahui Pemberdayaan Masyarakat melalui Usaha Budidaya Ikan Kerapu di Kabupaten Pesisir Selatan penulis menggunakan teori Pemberdayaan Masyarakat menurut Fahrudin (2012) yaitu :

1. *Enabling*
2. *Empowering*
3. *Protecting*

a. *Enabling*

Enabling yakni menciptakan lingkungan atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Menyadari bahwa setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan adalah langkah awal. Pemberdayaan adalah upaya untuk meningkatkan kekuatan ini dengan memotivasi, menginspirasi, dan memperhatikan potensi yang dimilikinya.

Pada indikator *Enabling* di Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan dalam melakukan sosialisasi mengenai program, tujuan, sasaran, manfaat dan juga mengajak

masyarakat Nelayan untuk ikut dalam Program Minapolitan melalui usaha budidaya Ikan Kerapu. Dimana hal ini merupakan upaya untuk melakukan pemberdayaan masyarakat dan membuat masyarakat keluar dari keterpurukan ekonomi. Masyarakat Nelayan yang ada di Kampung Sungai Nipah mau diajak untuk maju dan berkembang, dapat dilihat bahwa 90% Nelayan disana sudah ikut dalam Program Minapolitan dan sisanya yang tidak ikut memang karena belum memenuhi syarat untuk ikut Program Minapolitan.

b. *Empowering*

Empowering yaitu meningkatkan kapasitas diri dengan memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat agar dapat lebih maju lagi. Perkuatan ini seperti memberikan sebagai masukan (input) serta membuka wadah kepada peluang agar masyarakat menjadi lebih mampu. *Empowering* adalah upaya yang dapat dilakukan untuk mendorong suatu komunitas dan memberi seseorang kesempatan untuk berpartisipasi secara bertanggung jawab dalam rangka meningkatkan atau menemukan cara yang lebih baik untuk menyelesaikan tugas, yang akan meningkatkan kontribusi komunitas terhadap pencapaian tujuan organisasi.

Pada indikator *empowering* melalui program Minapolitan oleh Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan memberikan bantuan dari Program Minapolitan kepada Nelayan Kampung Sungai Nipah, Kecamatan IV Jurai, dengan baik, jumlah yang diberikan kepada kelompok Nelayan sesuai dengan data. Bantuan program Minapolitan diberikan kepada Nelayan setelah 1 tahun pengajuan, dengan syarat Nelayan ikut prosedur dan memenuhi syarat yang telah ditetapkan. Bantuan yang diberikan oleh Dinas Perikanan dan Pangan kepada kelompok Nelayan pembudidaya ikan kerapu yang berada di Kampung Sungai Nipah, berupa barang seperti keramba, benih, pakan, dan vitamin. Tetapi terkadang kualitas dari bibit yang diberikan pada program minapolitan di Kampung Sungai Nipah ini kurang bagus, seperti yang diberikan berukuran 10cm dan belum divaksin, sementara bibit yang bagus itu berukuran 12cm dan sudah divaksin.

c. *Protecting*

Protecting Secara khusus, menjaga kepentingan dengan menciptakan sistem perlindungan bagi penduduk yang sedang dikembangkan, membuat mereka semakin sadar akan hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam proses

pemberdayaan, perlu untuk mencegah yang lemah menjadi kuat, karena mereka kekurangan kekuatan di depan yang kuat. Dalam hal ini, perlindungan dipandang sebagai pencegahan persaingan yang tidak seimbang eksploitasi yang lemah oleh yang kuat. Intinya, melindungi tidak hanya membela yang lemah, juga membantu menjaga program pemberdayaan tetap berjalan dan berkembang.

Pada indikator *protecting* melalui program Minapolitan oleh Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan di Kampung Sungai Nipah, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan telah melakukan pengawasan untuk menjaga keberlanjutan pemberdayaan masyarakat melalui Program Minapolitan kepada Nelayan yang ada di Kampung Sungai Nipah, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan. Melakukan pengawasan pada Budidaya Ikan Kerapu yang dilakukan oleh Nelayan Kampung Sungai Nipah, Kabupaten Pesisir Selatan agar modal yang diberikan dapat digunakan sebaik-baiknya dan program Minapolitan dapat terus berkembang dan berkelanjutan. Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan melakukan pemantauan atau pengawasan 2-3 kali sebulan.

Tetapi masih ada beberapa Nelayan yang tidak mengelola bantuan yang diberikan dengan baik, sehingga Budidaya Ikan Kerapu melalui program Minapolitan yang dijalankan di Kampung Sungai Nipah, Kabupaten Pesisir Selatan berkembang lebih lama.

B. Faktor-faktor yang menghambat Pemberdayaan Masyarakat melalui Usaha Budidaya Ikan Kerapu di Kabupaten Pesisir Selatan (Studi Kasus Kelompok Nelayan Kecamatan IV Jurai)

Dari hasil penelitian yang sudah dilaksanakan faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan pada implemtnasi program Minapolitan di Kecamatan IV Jurai pada kelompok Nelayan Kampung Sungai Nipah, Kabupaten Pesisir Selatan yaitu :

a. Kurangnya Kualitas bantuan bibit dari pihak Pemerintah.

Bantuan yang dimaksud disini adalah bantuan dari Program Minapolitan untuk membantu mereka yang miskin, tidak mampu, atau berisiko dari risiko sosial, bantuan dapat berupa uang, barang, atau jasa. Bantuan adalah pemberian kepada masyarakat berupa barang atau uang yang bersifat tidak berkesinambungan dan mempunyai tujuan tertentu untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat. Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai pemberi bantuan pada Program Minapolitan memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab akan bantuan yang diberikan kepada Kelompok Nelayan Kampung Sungai Nipah, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan porsinya.

Peranan Dinas Perikanan dan Pangan dalam memberikan bantuan melalui peningkatan aktivitas dalam mengawasi dengan cara rutin, memiliki jadwal dan melakukan proses mengawasi harus orang-orang yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing pada program minapolitan. Sehingga mendapat pengertian melalui proses mengawasi diawali dari apa yang dilakukan pengawasan, aktivitas apa yang diawasi dan laporan dilaksanakannya dari proses mengawasi tersebut yang mana ketika memberikan laporan akan pengawasan pada bidang jelas antara permasalahan dilapangan dengan realita yang ada dilapangan sehingga dapat memberikan solusi.

Pada Indikator kurangnya kualitas bantuan bibit dari pihak Pemerintah bahwa Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan dalam memberikan bantuan pada

program Minapolitan kepada Nelayan Kampung Sungai Nipah sudah memberikan bantuan dengan baik kepada Nelayan di Kampung Sungai Nipah, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan. Hanya saja terkadang Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan mendapatkan bibit yang kurang bagus dari pihak Dinas Perikanan dan Pangan Provinsi Sumatera Barat tetapi tetap harus disalurkan kepada Kelompok Nelayan di Kampung Sungai Nipah, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan.

b. Ketidakmampuan beberapa Nelayan dalam mengelola Modal.

Mengelola modal yang baik adalah dengan melakukan pengaturan keuangan sesuai yang dikeluarkan dengan pemasukan. Modal merupakan satu diantara banyak komponen penting pada program Minapolitan dalam Budidaya Ikan Kerapu yang dilakukan oleh Nelayan Kampung Sungai Nipah, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan. Modal merupakan dana yang dipakai dalam melakukan pembiayaan aktivitas operasional Budidaya Ikan Kerapu. Jika modal budidaya tidak terkelola dengan baik maka kemungkinan yang terjadi adalah dana akan sulit berputar sehingga penghasilan yang diperoleh tidak optimal bagi Budidaya Ikan Kerapu yang

dilaksanakan di Kampung Sungai Nipah, Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan tersebut.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan bahwa ada beberapa Nelayan Kampung Sungai Nipah yang kurang baik dalam mengelola modal yang sudah diberikan dalam Budidaya Ikan Kerapu. Sehingga hal ini tentu saja membuat Budidaya yang dilakukan tidak berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Hal ini juga tentu saja membuat Program Minapolitan yang dijalankan akan berkembang lebih lama dari pada yang seharusnya.

c. Sifat Konsumtif Nelayan.

Sifat konsumtif merupakan perilaku atau gaya dari hidup yang suka melakukan pembelanjaan uang dengan tidak melakukan pertimbangan yang matang, melainkan hanya rasa-rasa ingin yang sudah tidak rasional lagi. Perilaku konsumtif merupakan kejadian yang berdampak pada kehidupan banyak orang, terutama yang bertempat tinggal di perkotaan bahkan masyarakat nelayan.

Kebutuhan dasar masyarakat nelayan yang belum terpenuhi, antara lain infrastruktur, pangan, kesehatan, pendidikan, dan lapangan kerja, dapat dilihat. Selain itu, minimnya peluang bisnis, akses teknologi, modal budaya, dan gaya hidup boros telah melemahkan ekonomi

masyarakat miskin. Keinginan masyarakat untuk mengkonsumsi barang-barang di era kehidupan modern tampaknya tidak lagi hanya mementingkan pada kebutuhan pokok.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat dilihat bahwa ada beberapa Nelayan Kampung Sungai Nipah yang memiliki sifat konsumtif tinggi, tidak hanya pada kebutuhan primer, tetapi juga kebutuhan sekunder, hal ini tentu saja juga merupakan hal yang dapat menjadi penghambat dalam melakukan usaha Budidaya Ikan Kerapu karena jika Nelayan terus menerus mementingkan kebutuhan sekunder, tentu saja modal yang diberikan bisa semakin menipis bahkan habis, hal ini akan berdampak pada lambatnya perkembangan Budidaya Ikan Kerapu yang dilakukan sehingga tidak berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya.

Simpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian mengenai Pemberdayaan Masyarakat melalui Usaha Budidaya Ikan Kerapu di Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan oleh Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan, maka bisa diambil kesimpulan dimana Pemberdayaan Masyarakat pada Program Minapolitan oleh Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten

Pesisir Selatan pada indikator *enabling* sudah berhasil, namun pada indikator *empowering*, dan *protecting* masih belum berhasil, karena ada beberapa faktor penghambat yaitu dimana ada beberapa bantuan bibit yang Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan berikan belum berkualitas kepada Nelayan Kampung Sungai Nipah. Selanjutnya dalam segi ketidakmampuan Nelayan dalam mengelola modal budidaya, hal ini dikarenakan ada beberapa Nelayan Kampung Sungai Nipah yang belum mengelola modal budidaya dengan baik, sehingga budidaya berkembang lebih lama dan tidak maksimal. Dan sifat konsumtif Nelayan, hal ini tentu saja dari segi operasional tidak dapat dilakukan dengan maksimal, karena Masyarakat Nelayan yang berperilaku konsumtif yang membuat budidaya Ikan Kerapu yang dijalankan tidak mendapatkan hasil yang maksimal.

Referensi

- Achmad Amirudd. (2018). Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) binaan dinas perdagangan kota Surabaya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan.
- Anwar. (2007). *Manajemen Pemberdayaan Perempuan*. Bandung : Alfabeta.
- Anwas, Oos M. (2013). *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. Bandung : Alfabeta.
- Arini Sulistyowati, Dwi Wahyu

- Prasetyono. (2018). Model pemberdayaan masyarakat usaha kecil menengah (UKM) di kawasan Surabaya.
- Ayler Beniah Ndraha, Dedy Pribadi Uang. (2018). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui Pengembangan Ekonomi Lokal di Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara.
- Bagas Prasetyo Nugroho. (2017). Pemberdayaan Masyarakat Lokalisasi Dolly melalui Pengembangan Wirausaha oleh Pemerintah Kota Surabaya.
- Cresswell, John W. (2013). *Resign Design : Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta : Pustaka Belajar.
- Daniel Sukalele. (2013). Membangun Masyarakat memberdayakan Rakyat di Bandung.
- Djohani. (2014). Pemberdayaan, Partisipasi dan Penguatan Kapasitas Masyarakat Bandung.
- Elfianto. (2016). Inovasi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam mempercepat pembangunan daerah. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*.
- Fahrudin. (2012). Peranan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dalam meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi.
- Firdausajho. (2015). Manajemen pada Pemberdayaan Masyarakat di bidang Ekonomi Sumatera Barat.
- Guntur Bagus Tri Atmojo, Darsono Wisadirana, Sholih Muadi. (2016). Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Produk Unggul Daerah (Studi pada IKM Batik di Desa Sumurgung Kecamatan Tuban.
- Habibur ahman, Iskandar Ali Ala, Hendri Dunan. (2018). Model strategi pemberdayaan dan pengembangan UMKM.
- Harry Hikmat. (2010). *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung : Humaniora Utama Press.
- Hendrik Yasin. (2015). Upaya Strategis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Kelompok Usaha Bersama (KEBE). *Jurnal Administrasi Publik*.
- Indriyani S. (2019). Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Buluh Manis Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis.
- Mardikanto. (2013). Pengembangan Masyarakat Kencana Prenada Media Group Jakarta.
- Martina. (2016). Pemberdayaan Masyarakat di Era Global.
- Marzuki. (2016). Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*.

- Mustangin, Desy. (2017). Pemberdayaan Masyarakat berbasis Potensi Lokal melalui Program Desa Wisata di Desa Bumiaji.
- Nurul Mualifah, Sri Roekminiati. (2018). Pemberdayaan Masyarakat Kampung Inggris sebagai Destinasi Wisata Edukasi di Kecamatan Pare Kabupaten Kediri.
- Nurul Umi Ati. (2019). Perspektif pemberdayaan perempuan warga Dolly melalui inovasi pengembangan UMKM pasca penutupan lokalisasi prostitusi.
- Saumel Paul. (2015). Strategi Pemberdayaan Pada Nelayan Sumatera Barat.
- Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D
- Suharto. (2017). Kemtiraan dan Model-model Pemberdayaan.
- Suyanto. (2013). Mengurangi Kemiskinan Masyarakat dengan Pemberdayaan Masyarakat yang Efektif dan Efisien.
- Totok Mardikanto, Poerwoko Soebinto. (2012). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Widiastuti. (2015). Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Pemerintah Daerah Bandung.
- Widjajanti Mulyono. (2014). Pemberdayaan Masyarakat dalam bidang Ekonomi Tinjauan Teoritik dan Implementasi Jakarta.
- Wilson. (2013). Pemberdayaan menuju Masyarakat Mandiri, Studi kajian di Kabupaten Pelalawan Alaf Riau Pekanbaru.
- Wrihatnolo. (2018). Pemberdayaan Masyarakat di Era Global.
- Zubaedi. (2013). Pemberdayaan Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat Jakarta.